

## BAB IV METODOLOGI

### 4.1. Metodologi *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Untuk menganalisis prioritas strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara, dirumuskan berdasarkan persepsi pelaku yang *expert* dalam penanganan PKL, dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode ini didesain untuk menangkap persepsi orang yang *expert* dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada tingkat preferensi diantara berbagai set alternatif, sehingga metode ini dianggap sebagai model *objective – multikriteria* (Azis,1994).

Metode ini dipilih sebagai alat bantu analisis karena jenis input data yang digunakan adalah data primer, yang merupakan persepsi responden terhadap permasalahan yang diajukan. Adapun kelebihan metode ini adalah : 1) Fleksibel dalam arti mampu mencakup seluruh permasalahan dengan tujuan dan kriteria yang beragam, tujuan yang berbeda/bias dimasukkan ke dalam satu level; 2) Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Penilaian tidak saja berdasarkan angka absolut, melainkan juga relatif (menggunakan skala); 3) Menggunakan data primer, sehingga tidak menghadapi masalah ketersediaan data; 4) Perhitungan tidak terlalu rumit (Saaty, 1994). Sedangkan kelemahannya adalah apabila responden memberikan penilaian yang keliru, dan ditambah dengan belum adanya kriteria yang jelas untuk seorang *expert*. Kebanyakan orang bertanya apakah persepsi seorang *expert* dapat mewakili kepentingan orang banyak, karena pada kenyataannya setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda dengan orang lain (Brodjonegoro (1992).

AHP merupakan salah satu model untuk pengambilan keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir manusia. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utama persepsi manusia. Ada dua jenis hirarki, yaitu lengkap dan tidak lengkap. Dalam hirarki lengkap, semua elemen pada suatu tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya. Jika tidak demikian, dinamakan hirarki tidak lengkap. Pada dasarnya AHP adalah metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak

terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu hirarki; memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Prinsip AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu sama lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan strategi penanganan PKL.

Selanjutnya hasil yang akan didapatkan dari pembobotan variabel-variabel dengan metode AHP akan menunjukkan peringkat faktor mana yang paling berpengaruh dalam penentuan prioritas strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara menurut persepsi responden. Penelitian ini menggunakan 9 (sembilan) responden, terdiri dari pihak eksekutif pemerintah kota, pihak legislatif, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, akademisi, dan asosiasi PKL.

Menurut Brodjonegoro (1992), aksioma dasar yang harus diperhatikan agar dapat menggunakan dan memahami metode AHP, antara lain: 1) *Reciprocal Comparasion*, 2) *Homogeneity*, 3) *Independence*, 4) *Expectation*. Sedangkan prinsip dasar AHP menurut Saaty (1994) adalah : 1) *Problem Decomposition*, 2) *Comparative Analysis*, 3) *Synthesis of Priority*. Dalam

Konsistensi dalam hal ini diartikan intensitas hubungan antar elemen yang didasarkan pada kriteria tertentu, saling membenarkan secara logis. Pengujian konsistensi dilakukan sebagai cara untuk melihat konsistensi jawaban penilaian pasangan perbandingan maupun struktur hirarki permasalahan. Hal tersebut dikarenakan pada kenyataannya menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin untuk memperoleh jawaban partisipan yang absolut konsisten (Junaidi, M., 2002). AHP mentoleransi tingkat konsistensi sebesar kurang dari dengan 10 persen, apabila lebih dari atau sama dengan 10 persen, maka harus ada revisi penilaian, karena tingkat inkonsistensi yang terlalu besar dapat menjurus pada suatu kesalahan (Brodjonegoro, 1992). Adapun formulasi untuk menghitung indeks konsistensi adalah sebagai berikut :

a). *Consistency Index*

$$CI = \frac{(\lambda - n)}{(n - 1)} \quad [4.1]$$

di mana:

$n$  = jumlah kriteria, bukan responden

$\lambda$  = rata-rata dari konsistensi vektor

b). *Consistency Ratio*

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad [4.2]$$

di mana:

RI = *random index*

**Tabel 4.1**  
**Random Index pada Berbagai Jumlah Alternatif**

Jumlah Alternatif yang Diperbandingkan (n)	Random Index (RI)
2	0.00
3	0.58
4	0.90
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41

Sumber: Brodjonegoro, 1992

Pengolahan data dilakukan dengan mentabulasikan hasil wawancara penelitian dalam bentuk tabel untuk kemudian dihitung nilai geometrianya (*geometric mean*), yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai seluruh data yang diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden (Spiegel, 1999). Rumus *geometric mean* adalah :

$$\bar{X} = \sqrt[n]{X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot \dots \cdot X_n} \quad [4.3]$$

Selanjutnya membentuk matriks *pairwise comparasion* yang membandingkan antara berbagai alternatif strategi dengan menggunakan prinsip kebalikan dan kemudian diisi dengan angka *geo-mean* yang diperoleh dari tabulasi. Langkah berikutnya, menghitung rasio tiap elemen terhadap nilai total elemen pada matriks *pairwise* kemudian dipindahkan untuk diubah menjadi matriks *priority vector*. Bobot nilai masing-masing alternatif strategi akan diperoleh dengan mencari nilai rata-rata baris dari matriks *priority vector*.

Langkah terakhir adalah menghitung rasio konsistensi (*consistency ratio/CR*), dengan terlebih dahulu menghitung *weighted sum vector* yang diperoleh dari penjumlahan antara perkalian nilai rata-rata pada matriks *priority vector* dengan nilai elemen dalam matriks *priority vector* akan diperoleh konsistensi vektor. Kemudian dilanjutkan dengan mencari *lambda* yang diperoleh dari nilai rata-rata konsistensi vector. Setelah mendapatkan nilai *lambda* dilanjutkan dengan menghitung nilai indeks konsistensi (CI) menggunakan persamaan [4.1] dan menghitung nilai rasio konsistensi (CR) dengan persamaan [4.2]. Tahapan menghitung bobot yang telah dijelaskan berlaku untuk perhitungan bobot faktor (level pertama) maupun bobot variabel (level kedua) dari struktur hierarki. Setelah bobot masing-masing faktor (level pertama) dan bobot masing-masing variabel (level kedua) didapat maka untuk mendapatkan bobot final dilakukan dengan mengkalikan nilai masing-masing bobot variabel level kedua dengan masing-masing bobot faktor level pertama.

#### **4.2. Hirarki Strategi Penanganan PKL Di Kota Administrasi Jakarta Utara**

Dari hasil wawancara dan diskusi dengan para *stakeholder*, dengan memperhatikan uraian pustaka yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, didapatkan beberapa faktor/aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi penanganan PKL, yaitu faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum. Faktor ekonomi meliputi aktivitas untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Cakupan kegiatan ini dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha

PKL, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008, penumbuhan iklim usaha meliputi aspek : pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan usaha meliputi aspek : produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Terhadap aspek perijinan usaha bagi PKL, sesuai amanah UU Nomor 20 Tahun 2008 agar disederhanakan dan dibebaskan dari biaya, sehingga aspek ini dianggap tidak perlu lagi dimasukkan sebagai pertimbangan strategi. Sedangkan untuk aspek dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia dikelompokkan kedalam pertimbangan aspek sosial. Sehingga beberapa alternatif strategi faktor ekonomi dapat disusun sebagai berikut :

- 1). Peningkatan akses permodalan;
- 2). Peningkatan akses pemasaran;
- 3). Perbaikan manajemen usaha;
- 4). Peningkatan kualitas produk;
- 5). Peningkatan sarana/prasarana usaha;
- 6). Kemitraan antar usaha mikro, kecil, menengah dan besar;
- 7). Penentuan lokasi strategis tempat usaha; dan
- 8). Pemberian akses terhadap jenis usaha/pekerjaan baru.

Pertimbangan faktor sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan PKL, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, dukungan kelembagaan, mengurangi kriminalitas, dan mengurangi masalah kependudukan/urbanisasi. Perkerja tidak terampil, meski bekerja dengan jam kerja panjang, akan memperoleh pendapatan perkapita yang rendah (Jhingan, 2008). Sesuai dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar PKL, maka melalui program pendidikan, pelatihan dan keterampilan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pedagang. Selain itu untuk meningkatkan kerjasama antara kelompok pemerintah dengan institusi informal PKL/organisasi non pemerintah, yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka peran dan tanggungjawab instansi/organisasi

yang terlibat dalam penanganan PKL tersebut harus diperkuat. Organisasi non pemerintah juga berfungsi sebagai pendampingan/ advokasi sosial bagi PKL. Tingginya migrasi ke perkotaan dengan lapangan kerja yang terbatas berimbas pada tumbuhnya PKL baru dan meningkatnya kriminalitas.

Migrasi penduduk ke kota memang merupakan hak asasi warga negara, namun pemerintah harus mampu mengendalikan penyebarannya, sehingga tidak terjadi eksekusi tenaga kerja di satu daerah/wilayah kota tertentu. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2004, pasal 3 ayat (1) menuliskan "setiap penduduk, pendatang dan tamu wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil", dan sesuai Pergub Nomor 16 Tahun 2005, dinas ini mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui tindakan yang bersifat preventif dan represif.

Adapun beberapa alternatif yang dipertimbangkan dalam faktor sosial dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Peningkatan kualitas SDM;
- 2). Pembinaan/advokasi sosial (termasuk kesehatan dan agama) terhadap PKL;
- 3). Penguatan kelembagaan/pengorganisasian/asosiasi PKL;
- 4). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan kependudukan;
- 5). Peningkatan keamanan lingkungan;
- 6). Peningkatan pengawasan terhadap penduduk pendatang;
- 7). Penertiban terhadap penduduk pendatang.

Faktor lingkungan dipertimbangkan untuk meningkatkan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan. Hasil wawancara menemukan bahwa masyarakat khususnya PKL kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, mereka cenderung menyerahkan masalah tersebut kepada pemerintah. Disamping itu kondisi geografis Jakarta Utara yang merupakan hilir/ujung sungai, juga menambah buruknya kebersihan akibat sampah kiriman dari berbagai daerah sekitarnya. Secara teknis masalah tersebut dapat diatasi dengan perbaikan sistem saluran, pengadaan sarana dan prasarana, sedangkan secara non teknis dilakukan melalui penyuluhan dan menegakkan peraturan kebersihan. Dari uraian tersebut,

dirumuskan beberapa alternatif strategi yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sebagai berikut :

- 1). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan;
- 2). Peningkatan pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan;
- 3). Peningkatan sarana/prasarana kebersihan lingkungan;
- 4). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan.

Pertimbangan faktor tata ruang bertujuan untuk mencegah bertambahnya alih fungsi lahan/fasilitas publik, dan mengembalikan fungsi lahan ke fungsi yang sebenarnya sesuai dengan RTRW, sebagai akibat pemanfaatan trotoar, taman, badan jalan dan fasilitas umum lainnya oleh PKL. Untuk mengatasi PKL (Pena, 1999), negara harus menjadi kunci dalam mengatur PKL, karena keberadaan negara sangat penting dalam proses pembangunan, disamping itu pemerintah dan PKL harus menegosiasikan ruang-ruang aksinya. Dari uraian tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah penataan, dan terhadap masyarakat juga dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota. Jadi dapat dirumuskan beberapa alternatif strategi, sebagai berikut :

- 1). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan penataan ruang;
- 2). Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kota;
- 3). Relokasi/penataan tempat usaha;
- 4). Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.

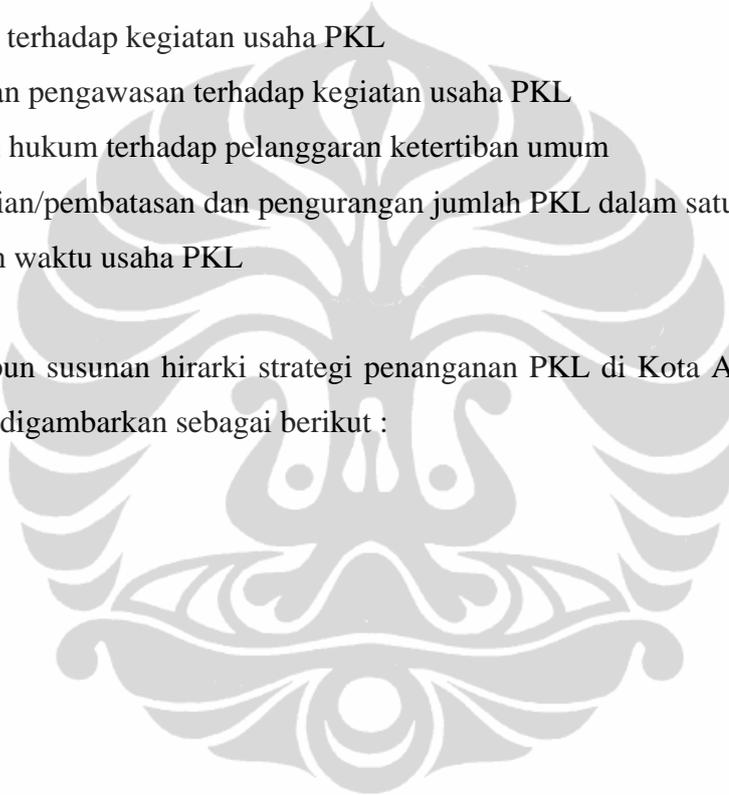
Faktor ketertiban umum merupakan aspek terakhir yang menjadi pertimbangan alternatif strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara. Faktor ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan dan kesemrawutan yang ditimbulkan, dan tidak terganggunya aktifitas/ketertiban masyarakat umum. Hasil kajian Bappeko Jakarta Utara (2007) menjelaskan beberapa permasalahan terkait ketertiban umum, yaitu : bahwa umumnya PKL kurang peduli akan masalah ketertiban dan kemacetan, justru kemacetan tersebut akan menjaring konsumen untuk membeli barang dagangannya; penggunaan lokasi PKL resmi maupun lokasi binaan sering melebihi batas; penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL tidak resmi/liar dampaknya hanya sementara, karena para PKL akan kembali ke lokasi semula setelah para petugas

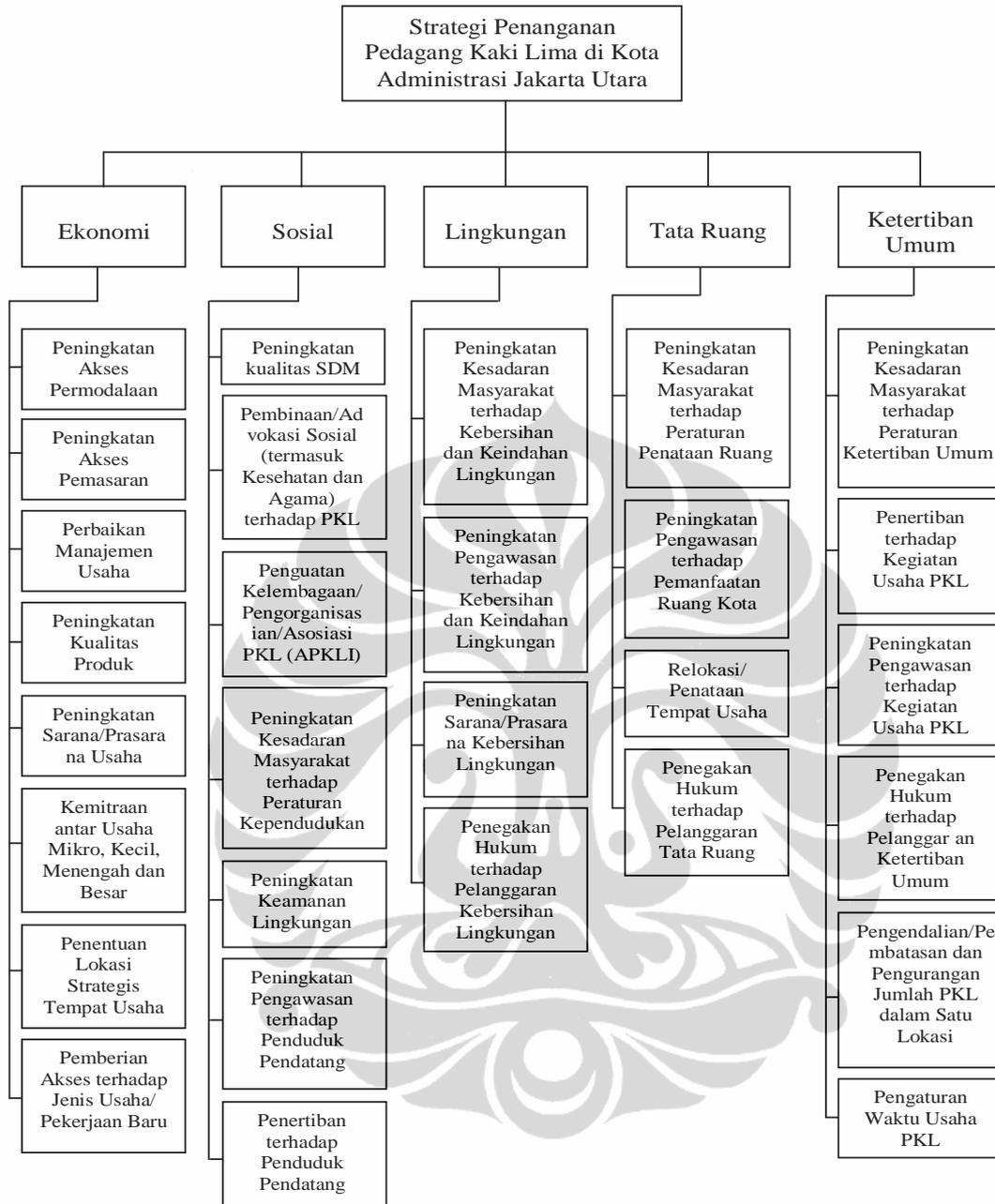
selesai melakukan penertiban; dan masyarakat sekitar kurang peduli terhadap masalah yang ditimbulkan oleh usaha kaki lima, karena keberadaan PKL tersebut dianggap bermanfaat bagi mereka. Sedangkan Perda Nomor 8 Tahun 2007, secara tegas melarang segala bentuk usaha tertentu (PKL), yang menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial tanpa seijin Gubernur.

Dari uraian tersebut maka disusun beberapa alternatif strategi yang dipertimbangkan dalam faktor ketertiban umum, sebagai berikut :

- 1). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan ketertiban umum
- 2). Penertiban terhadap kegiatan usaha PKL
- 3). Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha PKL
- 4). Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum
- 5). Pengendalian/pembatasan dan pengurangan jumlah PKL dalam satu lokasi
- 6). Pengaturan waktu usaha PKL

Adapun susunan hirarki strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara, digambarkan sebagai berikut :





**Gambar 4.1. Hirarki Strategi Penanganan PKL  
di Kota Administrasi Jakarta Utara**

Dari hirarki yang tersusun dalam **Gambar 4.1**, selanjutnya disusun kuesioner untuk disebarakan ke berbagai responden yang terkait. Kuesioner survei untuk penyusunan strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara, secara lengkap dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.